

Penerapan Model *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Vaksin COVID-19 Pada Sentra Vaksinasi Masjid Salman ITB

¹Resty Nurdiantika Ramadhanti, Wawan Setiawan Abdillah, Abdal

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; nurdiantikaresty27@gmail.com

Received: August 16, 2022; In Revised: October 5, 2022; Accepted: November 21, 2022

Abstract

In March 2020, there are various countries in the world were appaled by the Covid-19 virus, including Indonesia. At ten months intervals, in January 2021 the Indonesian government finally started a vaccine program, to speed it up, vaccine centers were created in each area. In the city of Bandung itself, the local government accentuate collaboration in efforts to cope the pandemic. Therefore, the Bandung City Health Service, YPM Salman ITB, and the society work together in a collaboration to set up the ITB Mosque Vaccine Center which also indirectly applies the Collaborative Governance model in its implementation. However, the application of the Collaborative Governance model in this vaccine program still needs to be researched further, therefore the researchers are interested in taking this topic to find out how the Collaborative Governance model is applied in the vaccine program that took place at the Salman Mosque Vaccination Center, ITB. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and literature studies. In that implementation, the collaboration that was carried out went smoothly and could be said to be optimal based on the Ansell & Gash criteria. This is also because each stakeholder has adequate capacity and resources, along with understands their respective tasks and roles so that the Salman Mosque Vaccine Center ITB can be managed properly.

Keywords: Collaborative Governance, Collaboration, Program, Vaccine, Covid-19

Pendahuluan

Setidaknya hingga awal tahun 2022 masih banyak negara di dunia tak terkecuali Indonesia masih dihadapkan dengan situasi pandemi yang belum berakhir sepenuhnya. Sejak munculnya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada awal tahun 2020, tak butuh waktu lama bagi virus ini untuk menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan kasus penularan tertinggi berada di Pulau Jawa. Kota Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat pun menjadi salah satu wilayah dengan angka kasus penularan Covid-19 tertinggi pada awal terjadinya pandemi di Indonesia. Sampai tanggal 8 November 2021, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui *website* Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung (PUSICOV) tercatat total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bandung yakni sebanyak 43.237 orang, dengan 1.422 orang diantaranya meninggal dunia. Tentunya situasi pandemi ini menjadi cobaan bagi seluruh rakyat Indonesia juga pemerintah, akan tetapi kita perlu bangkit dan berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk dapat terlepas dari pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia tentunya melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19, salah satu upaya yang dimaksimalkan oleh pemerintah yakni melalui program vaksin. Program vaksin di Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, ditandai dengan pemberian dosis vaksin pertama kepada Presiden RI Joko Widodo yang bertempat di Istana

Negara. Hal ini tentunya menjadi suatu strategi pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat guna menyukseskan program vaksin di Indonesia.

Di daerah, program vaksin terus dilaksanakan dengan mengikuti arahan pemerintah pusat dan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar program dapat terlaksana secara maksimal mengingat situasi kedaruratan Covid-19 yang perlu ditangani dengan cepat. Di Kota Bandung, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan pada tanggal 8 November 2021 tercatat dari keseluruhan target atau sasaran vaksinasi masyarakat Kota Bandung dengan total 1.952.358 jiwa, 95% diantaranya telah mendapatkan dosis vaksin pertama, dan 78% telah mendapatkan dosis vaksin lengkap. Hal ini tentunya masih perlu dilanjutkan guna mencapai target vaksinasi 100%. Guna mendukung keberlanjutan program ini diperlukan upaya serta strategi yang baik, salah satu cara yang dilakukan yakni dengan mendirikan sentra-sentra vaksin Covid-19 di tiap daerah.

Di Kota Bandung sendiri hingga saat ini telah banyak berdiri sentra vaksinasi yang siap melayani masyarakat. Salah satunya merupakan sentra vaksinasi Covid-19 yang diinisiasi oleh Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), dimana sentra vaksin yang berlokasi di kawasan Masjid Salman ITB ini termasuk ke dalam sentra vaksin berbasis masjid pertama yang berdiri di Indonesia sejak program vaksin digaungkan oleh pemerintah. Sentra vaksinasi Salman ITB ini merupakan hasil dari kolaborasi yang dilakukan oleh YPM Salman ITB, Dinas Kesehatan Kota Bandung, komunitas masyarakat, serta dukungan banyak pihak. Sentra vaksin ini didirikan guna mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan pemberian dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat khususnya di Kota Bandung.

YPM Salman ITB sebagai penginisiasi sentra vaksin ini pun sebelumnya telah banyak berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, diantaranya dengan menyediakan bantuan berupa alat kesehatan (ventilator & APD), serta penyediaan rumah isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan di masa yang akan datang pun YPM Salman ITB menyatakan komitmennya untuk tetap berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Akan tetapi pada saat ini program vaksinasi tetap menjadi fokus utama YPM Salman ITB sebagai kunci pengentasan pandemi Covid-19.

Kolaborasi dapat menjadi salah satu solusi yang tepat guna percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi Provinsi Jawa Barat (27/7) menyampaikan bahwasannya jika seluruh pihak turut berpartisipasi dalam menyukseskan program vaksin, maka *herd immunity* atau kekebalan kelompok di Jawa Barat akan terbentuk lebih cepat jika dibandingkan tanpa adanya kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak yang berwenang juga masyarakat, diharapkan program vaksin dapat selesai pada akhir tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, pada sentra vaksinasi Salman ITB pun kolaborasi menjadi strategi utama guna mendukung keberhasilan program.

Berbicara mengenai kolaborasi, dalam kajian Administrasi Publik kolaborasi dapat dikatakan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mencapai tujuan dalam suatu kegiatan tertentu. Kolaborasi tentunya dapat dilakukan dalam sektor publik, selain bertujuan untuk mencapai hasil kerja sama dengan lebih maksimal, kolaborasi pun dilakukan karena adanya keterbatasan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka dari itu, guna mengatasi permasalahan-permasalahan serta mencapai hasil terbaik dari suatu program dalam sektor publik, kolaborasi dapat menjadi solusi terbaik.

Seiring berjalannya waktu, banyak cara dilakukan guna menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Dalam tata kelola pemerintahan terdapat suatu model strategi baru yang disebut dengan *collaborative governance*, dimana pemerintah turut melibatkan pihak-pihak lain di luar pemerintahan yang memiliki kepentingan yang sama dalam upaya menyelesaikan suatu isu atau masalah publik. Pihak-pihak lain selain pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu atau masalah publik disini adalah pihak swasta sebagai aktor privat, juga masyarakat. Ketiga elemen pemangku kepentingan atau *stakeholder* tersebut saling bekerja sama dalam merencanakan, mengambil keputusan, serta menentukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Ansell & Gash mengemukakan bahwasanya *Collaborative governance* merupakan suatu konsep dimana dalam proses pembuatan kebijakan formal turut melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah dengan berorientasi pada kesepakatan bersama (konsensus) serta pertimbangan mendalam (deliberatif) guna mengatur dan mengimplementasikan kebijakan, program, maupun aset publik. (Tilano, F. A., & Suwitri, S., 2019: 6) Edward DeSeve mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu integrasi sistem dimana terdapat hubungan lintas lembaga atau organisasi baik formal maupun informal guna mencapai kesuksesan dengan konsep kinerja yang jelas. Agrawal & Lemos berpendapat bahwasanya *collaborative governance* tidak hanya berpusat pada kepentingan *state* dan *non-state* saja, tetapi konsep ini terbentuk atas adanya keterlibatan dan sinergi antar *stakeholder* yakni sektor publik, sektor privat, komunitas publik, juga masyarakat yang menyusun serta menggabungkan perencanaan secara bersama-sama.

Sejalan dengan pendapat di atas, Balogh dkk memiliki pandangan bahwasanya *collaborative governance* merupakan suatu proses dan struktur dalam perumusan kebijakan dengan adanya keterlibatan aktor-aktor dari berbagai tingkatan mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, instansi publik, juga masyarakat sipil guna mengkonstruksi suatu program atau kebijakan yang jika dilakukan secara bersama-sama akan tercapai suatu tujuan publik. Robertson & Choi pun mengemukakan bahwasanya *Collaborative governance* merupakan suatu proses kerja sama dimana kedudukan para pemangku kepentingan bersifat setara dan di dalamnya masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi juga gagasan dalam proses kerja sama tersebut. (Sunu Astuti Hardi Warsono Abd Rachim, n.d.)

Konsep *collaborative governance* berfokus pada kebijakan serta masalah publik. Pemerintah sebagai aktor publik tentunya memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam membuat kebijakan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Akan tetapi pemerintah pun terkadang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan hal tersebut, maka dari itu proses kolaborasi perlu dilakukan dengan cara mencapai konsesus di antara pihak- pihak berkepentingan dengan harapan dapat terwujudnya keadilan sosial dalam proses pemecahan masalah dan pemenuhan kepentingan publik.

Baik disadari maupun tidak, pelaksanaan program vaksin yang dilakukan pada sentra vaksinasi Salman ITB secara tidak langsung telah mengaplikasikan model *collaborative governance*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses kerja sama yang dilakukan oleh YPM Salman ITB sebagai pihak swasta, Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai pihak pemerintah, juga komunitas masyarakat yang seluruhnya memiliki satu tujuan, yakni untuk mempercepat pemberian dosis vaksin kepada masyarakat dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya Kota Bandung. Akan tetapi, penerapan model *collaborative governance*

masih perlu dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana pengaplikasian model tersebut dalam pelaksanaan program yang berlangsung di sentra vaksinasi Salman ITB, serta sejauh mana model ini berperan dalam keberhasilan program vaksinasi tersebut.

Penerapan model *collaborative governance* dalam pelaksanaan program vaksin Covid-19 di sentra vaksinasi Salman ITB dipilih sebagai fokus dan lokus dalam kajian penelitian ini dengan alasan kebaruan, di mana sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait hal ini, ditambah urgensi mengenai strategi yang diperlukan dalam rangka percepatan program vaksin mengingat situasi pandemi yang belum usai. Atas dasar itulah peneliti memutuskan untuk mengangkat tema mengenai model strategi *collaborative governance* dalam pelaksanaan program vaksin Covid-19 pada Masjid Salman ITB.

Adapun mengenai konsep atau model *collaborative governance*, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas hal tersebut, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Anang Sugeng Cahyono dalam artikel berjudul “Implementasi Model *Collaborative Governance* Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penerapan *collaborative governance* pun diperlukan proses dan perencanaan yang matang guna mengefektifkan kinerja dengan berdasar kepada kesesuaian data dan informasi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dan diperhatikan guna menyelesaikan pandemi menggunakan model *collaborative governance* yakni perlu dibentuknya satuan tugas khusus, adanya jaminan layanan kesehatan, memastikan masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, serta pemanfaatan teknologi dalam menangani Covid-19 (Cahyono, 2021).

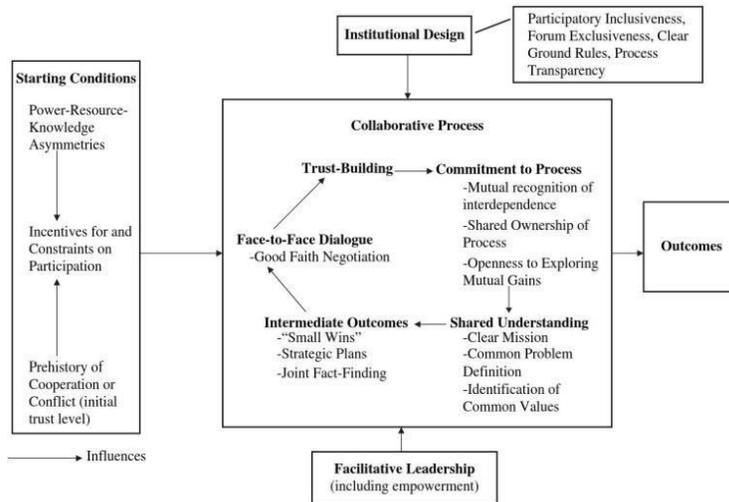
Selanjutnya penelitian terkait yang dilakukan oleh Fawwaz Aldi Tilano & Sri Suwitri dalam artikel yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang”. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengaplikasian model *collaborative governance* dalam upaya keselamatan lalu lintas di Kota Semarang berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 3 dari 5 variabel atau fenomena yang dikemukakan oleh Ansell & Gash dalam praktek *collaborative governance*. Variabel yang berjalan dengan baik yakni kondisi awal, dan desain kelembagaan. Akan tetapi masih belum optimal pada variabel kepemimpinan dan proses kolaboratif, hal ini dikarenakan penyelenggaraan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dilakukan secara situasional dan tidak menjadi agenda rutin. Faktor pendukung pengaplikasi konsep *collaborative governance* dalam penelitian ini antara lain adanya struktur yang jelas, komitmen tinggi para *stakeholders*, pembagian tanggungjawab yang jelas, serta *information sharing* yang sudah baik. Adapun faktor penghambat yakni sumber daya manusia yang secara kuantitas maupun kualitas masih belum mencukupi. (Tilano & Suwitri, 2019)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Roni Ekha Putra dkk dalam artikel “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Penyebaran Kasus *Corona Virus Disease-19* di Kota Padang”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Padang menggunakan konsep *collaborative governance* dengan pendekatan *pentahelix* sebagai upaya menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di kotanya. Hasilnya, setelah menggunakan konsep *collaborative governance* dan melibatkan banyak pihak dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19, pada akhirnya terhitung sejak 26 Oktober 2020 Kota Padang terbebas dari zona merah. Hal ini dapat menjadi bukti keefektifan model strategi *collaborative governance* dalam menyelesaikan permasalahan public (Ekha et al., 2020).

Jika melihat penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang akan membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam artikel ini. Dalam artikel ini, kajian akan lebih berfokus pada analisis sejauh mana model *collaborative governance* diterapkan pada program vaksin yang diadakan oleh sentra Salman ITB dengan mengikuti kajian variabel praktikserta serta tahapan proses kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell & Gash.

Gambar 1.

Model Collaborative Governance



Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

Gambar di atas merupakan representasi visual atau bentuk “model” dari konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif merupakan variabel luas yang mana masing-masing variabel tersebut masih dapat diperinci penjelasannya seperti yang tertera pada tabel. Variabel proses kolaboratif merupakan inti dari model *collaborative governance* ini, dengan variabel lainnya yakni kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan direpresentasikan sebagai variabel kritik kontribusi terhadap proses kolaborasi. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model *collaborative governance* dalam pelaksanaan program vaksin pada Sentra Vaksinasi Salman ITB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Ansell & Gash, dimana dalam jurnalnya yang berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” dikemukakan bahwasanya terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam praktek *collaborative governance* yakni: 1) Kondisi Awal; 2) Desain Kelembagaan; 3) Kepemimpinan; dan 4) Proses Kolaboratif. Dalam proses *collaborative governance*, terdapat lima tahapan yang harus dilakukan, dimulai dari: 1) Dialog Antar Muka; 2) Membangun Kepercayaan; 3) Komitmen; 4) Pemahaman Bersama; serta 5) Dampak Sementara.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan model *collaborative governance* dalam pelaksanaan program vaksin Covid-19 pada sentra vaksinasi Salman ITB, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Metode dan pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan pendekatan ini dianggap tepat dan sesuai dengan kebutuhan peneliti guna mengolah data yang dilakukan dengan cara menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian (Cresswell dalam Afriyani et al., 2021). Penelitian ini termasuk ke dalam model studi kasus, dimana peneliti menggali dan mengeksplorasi suatu peristiwa yang terjadi pada kehidupan sosial (baik pada individu maupun kelompok) pada kegiatan dan waktu tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi serta metode dengan tujuan agar peneliti dapat memiliki pemahaman lebih baik terkait peristiwa tersebut (Wahyuningsih, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara guna mendapatkan informasi dari sudut pandang informan yang berkaitan dengan judul penelitian (Cresswell dalam Afriyani et al., 2021). Selain wawancara, pengumpulan data dan informasi sekunder juga dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai kajian literatur baik berupa dokumen, artikel, karya ilmiah, serta pemberitaan media massa. Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik ini dipilih dengan pertimbangan peneliti guna memilih sampel yang dianggap tepat dan dapat merepresentasikan objek penelitian. Dalam hal penyajian, hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk artikel secara deskriptif dengan data yang sudah dianalisis melalui teknik reduksi data, *display data*, dan *conclusion drawing*, serta diuji validitasnya datanya melalui teknik triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum proses kolaborasi dilakukan. Tergantung dengankondisi yang terjadi sebelum kolaborasi, kedepan hal tersebut dapat menjadi pendorong bahkan penghambat dalam keseluruhan proses kolaborasi antar *stakeholder*. Dalam variabel ini terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan yakni keseimbangan pengaruh/sumber daya/pengetahuan antar *stakeholder*, sejarah masa lalu, juga dorongan dan kendala untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Kemunculan wabah Covid-19 pada Maret tahun 2020 tentunya menjadi sebab yang memaksa pemerintah serta seluruh masyarakat berpikir mencari cara untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Hal tersebut merupakan kondisi awal yang mendasari pemerintah segera mengambil tindakan yakni dengan mengeluarkan berbagai macam aturan serta kebijakan agar situasi tetap terkendali serta mencegah wabah semakin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ketikasedang berada di puncak pandemi, satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Maka dari itulah banyak sentra-sentra atau pos vaksin didirikan di berbagai wilayah. Sentra vaksin yang berlokasi di Masjid Salman ITB merupakan salah satunya. Alasan berdirinya sentra vaksin Masjid Salman ITB dikarenakan pada awal kemunculan vaksin, pemerintah memprioritaskan beberapa kategori masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin lebih dulu, diantaranya adalah lansia, tenaga kesehatan, juga tenaga pengajar. Masjid Salman yang berada di kawasan perguruan tinggi ITB tentunya

menjadi salah satu fasilitas serta tempat berkumpul bagi mahasiswa, tenaga pengajar, juga masyarakat yang akan melaksanakan ibadah. Hal ini pun diperhatikan oleh Yayasan Pengurus Masjid (YPM), mengingat dalam situasi pandemi dikhawatirkan terdapat jemaah yang terpapar virus Covid-19 dan untuk memastikan keamanan beribadah dari ancaman penyakit, maka dari itu YPM Salman ITB berinisiatif untuk mendirikan sentra vaksin dengan berkolaborasi serta mengikuti arahan dari pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Bandung), juga dibantu oleh masyarakat yang secara sukarela berkontribusi demi percepatan vaksinasi.

Pada awal pandemi sebelum adanya vaksin, YPM Salman ITB pun sudah memiliki catatan kolaborasi atau kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam penanganan Covid-19, yakni dengan memberikan dukungan berupa ventilator, APD, serta alat-alat kesehatan lainnya bagi rumah sakit, dukungan penyediaan rumah isolasi bagi pasien Covid-19, bantuan makanan, dan bantuan lainnya. Selain itu kedepannya YPM Salman ITB pun mengungkapkan keinginannya untuk terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam pelaksanaan vaksinasi massal di sentra vaksin Masjid Salman ITB ini terdapat banyak sumber daya yang harus dipersiapkan, dimana seluruh regulasinya telah diatur oleh pemerintah sebagai syarat mendirikan sentra vaksin. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah tersedianya dosis vaksin, tenaga kesehatan (vaksinator), SDM sebagai petugas, akomodasi, transportasi, dll. Seluruh sumber daya tersebut berhasil dikelola sedemikian rupa oleh para *stakeholder* sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Desain Kelembagaan

Variabel ini memuat konsep aturan yang harus ditaati ketika proses kolaborasi berlangsung, hal ini penting mengingat perlu adanya prosedur dan legitimasi yang jelas agar proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Hampir keseluruhan regulasi mengenai upaya penanganan Covid-19 diatur oleh pemerintah yang berkedudukan sebagai regulator melalui Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan. Terdapat syarat-syarat serta mekanisme yang harus ditaati oleh YPM Salman ITB sebelum mengajukan kegiatan vaksinasi massal atau membuat sentra vaksin. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelaksana fasilitas kesehatan antara lain tersedianya tenaga kesehatan, adanya sarana rantai dingin sesuai jenis vaksin, juga adanya izin dari Menteri untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Adapun mekanisme pengajuan mendirikan sentra vaksin yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

Gambar 2.
Mekanisme Alur Pengajuan Kegiatan Vaksinasi



Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, N.D.

Mekanisme di atas tentunya berlaku bagi seluruh institusi/organisasi masyarakat yang ingin turut berkontribusi dengan mendirikan sentra vaksin. Setelah memenuhi mekanisme pengajuan tersebut dan mendapatkan persetujuan, kemudian yang perlu dipersiapkan yakni sebuah tim pelaksana yang akan bertugas di berbagai bidang berbeda, antara lain persyaratan, skrining, pemberian vaksin, petugas observasi setelah vaksin, pencatatan data, pengelola limbah medis, serta pengarah alur.

Meskipun aturan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi tata laksana dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi di daerah dapat berjalan dinamis, dalam artian cara-cara serta strategi yang dilakukan dapat berbeda-beda menyesuaikan situasi, kondisi, serta kebutuhan daerah tersebut, tentunya dengan tetap mengacu pada aturan pemerintah pusat. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yakni Sub-Koordinator bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung, beliau menjelaskan bahwasanya

“ dalam teknik pelaksanaan sentra vaksin di Kota Bandung terdapat sesuatu yang ibaratnya menjadi persyaratan tak tertulis, di mana persyaratan ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Misalnya ada suatu institusi besar yang ingin mengadakan vaksinasi bagi anggotanya, kami mensyaratkan rasio 1:1, yang artinya jika terdapat 1000 anggota dalam institusi tersebut, maka harus disediakan pula 1000 dosis vaksin tambahan yang harus dibagikan untuk masyarakat pada satu kegiatan vaksinasi....”

Hal ini tentunya merupakan strategi cerdas yang dipikirkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung untuk mendorong percepatan vaksinasi. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung pun memiliki standar pengayaan fasilitas vaksinasi massal yang harus dipenuhi oleh YPM Salman ITB serta calon pelaksana fasilitas kesehatan lainnya, yakni:

Gambar 3.

Standar Pengayaan Fasilitas Sentra Vaksin

SDM		LOGISTIK	
Tenaga Kesehatan (40 Orang)	10 Tensi 10 Skrining 10 Vaksinator 10 Pendamping Vaksinator	Alat Kesehatan	10 Tensi 10 Termogun 10 Kotak Handscoon 10 Kotak Tisu 30 Pcs Gown Medis 5 Box Masker Medis 20 Handsanitizer
Tenaga Non Kesehatan (20 Orang)	5 Verifikasi 10 Pcare 10 Pencatatan Manual	Logistik	20 Laptop 10 Printer 10 Hekter+Isi 10 Sambungan listrik SoundSystem dan 2 Microphone 3 Rim Kertas 50 Pcs Pulpen 1000 Rangkap Formulir Kertas Kendali
		Logistik Lainnya	Petunjuk Ruangan/Meja (Tensi, Ruang Skrining dan Vaksin, Ruang Observasi, Meja (Pencatatan dan Pelaporan). Penomoran pada meja, dari meja vaksin sampai meja pencatatan dan pelaporan.
		Konsumsi	Estimasi 75 (Petugas kesehatan dan non kesehatan)

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, ketersediaan SDM sangat diperlukan mengingat sudah dapat dipastikan banyak masyarakat yang harus dilayani. Maka dari itu YPM Salman ITB sebagai fasilitator membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai sukarelawan untuk turut berkontribusi dalam membantu kesuksesan program vaksin ini. Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, peneliti dapat melihat bahwasanya YPM Salman ITB benar-benar serius dalam mempersiapkan dan memenuhi semua persyaratan, juga mengikuti mekanisme yang berlaku sehingga mendapatkan izin pelaksanaan sesuai regulasi untuk melakukan vaksinasi massal di wilayahnya. Selanjutnya, kolaborasi dilanjutkan pada pelaksanaan di lapangan antara DinasKesehatan yang memiliki kedudukan sebagai sebagai regulator, YPM Salman ITB sebagai fasilitator, dan Masyarakat sebagai sukarelawan.

Gambar 4.

Poster Vaksinasi Covid-19 Masjid Salman ITB



Sumber: Instagram @salmanitb

Informasi dibukanya sentra vaksin pada Masjid Salman ITB disebarikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti sosial media. Akun Instagram resmi Masjid Salman ITB (@salmanitb) dan juga akun Instagram Dinas Kesehatan Kota Bandung (@dinkeskota.bdg) yang memiliki ribuan pengikut dimanfaatkan sebagai saluran informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan sentra vaksin tersebut. Informasi dikemas dalam bentuk grafis yang menarik sehingga diharapkan masyarakat tertarik untuk datang dan mendapatkan suntikan vaksin.

Di lapangan ketika sentra vaksin beroperasi, alur administrasi dibuat dengan sangat jelas sehingga masyarakat tidak kebingungan karena banyak petugas sukarelawan yang siap membantu. Selain itu, YPM Salman ITB pun menggunakan suatu sistem bernama AntriQue, di mana masyarakat tidak perlu mengantri ketika berada di lokasi vaksin, akan tetapi nomor antrian didaftarkan secara mandiri oleh peserta vaksin via online menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini menjadi suatu kelebihan karena tidak akan menimbulkan kerumunan antrian di lokasi vaksinasi. Adapun alur yang harus diikuti calon penerima vaksinasi di lokasi yaitu pendaftaran- verifikasi, screening-vaksinasi, lalu pencatatan dan observasi.

Kepemimpinan

Keberadaan pemimpin merupakan hal mutlak yang perlu ada dalam kegiatan organisasi, begitupun dalam proses kolaborasi. Dikarenakan dalam proses kolaborasi banyak pihak yang terlibat, perlu adanya sosok pemimpin yang mampu memimpin jalannya program dengan baik. Sosok yang dihormati serta dapat dipercaya sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan proses kolaborasi. Keberadaan pemimpin yang hebat akan meningkatkan kemungkinan suatu proses kolaborasi agar dapat berhasil. Pemimpin disini pun memiliki peran sebagai mediator dikarenakan terdapat peluang akan timbulnya konflik atau perselisihan ketika berlangsungnya proses kolaborasi.

Dalam variabel ini Ansell & Gash mengemukakan bahwasanya terdapat tiga kriteria yang efektif dalam kepemimpinan kolaboratif, yakni manajemen yang baik, kemampuan dan kredibilitas SDM melaksanakan teknis, serta memastikan kolaborasi yang dilakukan menghasilkan output yang kredibel. (Yahya, n.d.) Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, YPM Salman ITB, serta masyarakat dalam hal ini berjalan dinamis serta terorganisir, di mana setiap stakeholder memiliki seorang perwakilan yang bertugas sebagai pemimpin. Pemimpin dari setiap stakeholder tentunya memiliki kemampuan yang mumpuni serta dapat bekerja secara komunikatif serta kooperatif guna mewujudkan visi, misi, serta tujuan kolaborasi ini. Selain itu, tanggung jawab pemimpin dalam setiap stakeholder adalah untuk memastikan setiap anggota yang terlibat memahami peran, tugas, dan fungsinya masing-masing sehingga tiga kriteria dalam kepemimpinan kolaboratif yang efektif dapat terpenuhi, dan pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Proses Kolaboratif

Terdapat lima tahapan yang harus dilakukan dalam collaborative governance, yakni:

a. Dialog Tatap Muka

Keseluruhan proses kolaborasi dibangun atas adanya dialog antar muka antar para stakeholder. Agenda dialog antar muka ini dilakukan dengan tujuan melahirkan suatu kesepakatan bersama atau konsensus akan program yang akan dijalankan. Lazimnya hal yang dibicarakan selama agenda dialog antar muka ini ialah mengidentifikasi peluang, tujuan, serta

keuntungan yang akan dicapai jika pihak-pihak yang berkepentingan sepakat untuk melakukan kolaborasi. Dalam kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Bandung, YPM Salman ITB, juga masyarakat dialog tentunya dilakukan akan tetapi mengingat situasi pandemi yang tidak memungkinkan bagi para stakeholder untuk bertemu tatap muka, maka alternatif yang dilakukan adalah diskusi via online melalui aplikasi conference. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi esensi dari dialog yang dilakukan untuk mempersiapkan program dan kesepakatan pun tetap tercapai.

b. Membangun Kepercayaan

Diawali dengan proses dialog, salah satu output yang dihasilkan dari agenda tersebut ialah timbulnya rasa saling percaya di antara para stakeholder. Dalam setiap kesempatan, para stakeholder perlu membangun kepercayaan, hal ini penting mengingat kolaborasi yang dilakukan melibatkan banyak pihak dan guna menghindari adanya kesalahpahaman, seluruh proses kolaborasi harus dilandasi dengan rasa saling percaya serta transparansi. Akan tetapi, perlu diingat bahwasanya membangun rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berkepentingan bukanlah hal mudah, diperlukan waktu panjang serta komitmen yang tinggi dalam tahapan ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan YPM Salman ITB pernah menjalin kerjasama dalam penanganan Covid pada awal pandemi, yang mana hal ini meningkatkan kepercayaan di antara kedua stakeholder tersebut untuk bekerjasama kembali dalam program vaksinasi.

c. Komitmen

Dalam proses kolaborasi terdapat rasa saling ketergantungan di antara pihak-pihak yang terlibat, atas dasar inilah perlu adanya komitmen tinggi dari para stakeholder dalam menjalankan kolaborasi. Hal yang perlu ditekankan yakni kolaborasi bukan hanya tentang kesepakatan singkat, akan tetapi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen tinggi dalam setiap pelaksanaannya. Komitmen dan tanggungjawab yang ditunjukkan oleh setiap stakeholder dalam kolaborasi ini sangatlah tinggi. Setiap stakeholder dapat meyakinkan dan membuktikan komitmennya melalui pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing dengan baik. Dinas Kesehatan membuat aturan dan ketentuan, YPM Salman ITB memberikan fasilitas dan akomodasi, dan masyarakat secara sukarela membantu jalannya program. Semuanya bergotong royong dan memiliki kontribusi yang besar demi kesuksesan program ini.

d. Pemahaman Bersama

Dibutuhkan pemahaman bersama akan apa yang perlu dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Guna mencapai pemahaman bersama ini, perlu adanya definisi permasalahan, strategi, serta nilai tujuan yang jelas dalam kolaborasi. Pemahaman bersama merupakan salah satu output dari tahapan dialog, di mana setelah berdiskusi seluruh stakeholder dalam kolaborasi ini dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kolaborasi, serta cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencapai target/tujuan kolaborasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber berpendapat bahwasanya masing-masing stakeholder baik itu Dinas Kesehatan, YPM Salman ITB, maupun Sukarelawan seluruhnya mampu memahami keseluruhan ide dalam kolaborasi ini dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Sebagai contoh, dalam kolaborasi ini Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki wewenang dalam mengatur regulasi, menyediakan vaksin, serta mengawasi tata laksana pendistribusiannya. YPM Salman ITB memenuhi persyaratan dari pemerintah, menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksin, serta mengelola

teknis di lapangan. Sedangkan Sukarelawan menempati posisi melayani masyarakat dalam alur sentra vaksin.

e. Dampak Sementara

Guna memperbesar kemungkinan suatu program kolaborasi dapat terus berlanjut, setidaknya perlu ada dampak atau hasil sementara yang dirasakan seluruh pihak selama berlangsungnya program. Dampak sementara dalam hal ini mengacu kepada hasil positif yang diharapkan mampu menjadi dorongan dan motivasi bagi para stakeholder untuk melanjutkan program dengan komitmen lebih besar. (Sunu Astuti Hardi Warsono Abd Rachim, n.d.) Sejauh ini dampak atau hasil sementara yang didapatkan dari kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Bandung, YPM Salman ITB, dan juga Masyarakat ialah peyuntikan lebih dari 6.000 dosis vaksin 1& 2, dan sampai saat ini masih terus dilanjutkan dengan pemberian vaksin dosis ke-3 (booster) yang diharapkan dapat membantu tercapainya target vaksin booster sebanyak 976.179 sasaran (50%) bagi Kota Bandung.

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwasanya penerapan strategi Collaborative Governance dalam pelaksanaan program vaksin pada Sentra Vaksinasi Masjid Salman ITB ini sudah berjalan dengan optimal berdasarkan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Dinas Kesehatan, YPM Salman ITB, juga Masyarakat yang menjadi stakeholder dalam kolaborasi ini bekerja dengan baik mulai dari menganalisa kondisi awal yang terjadi, hingga sampai pada proses kolaborasi itu sendiri. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan, akan tetapi semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Maka dari itu diharapkan agar proses kolaborasi ini tidak berakhir begitu saja, akan tetapi terus berkembang dengan strategi-strategi baru yang lebih baik.

Kolaborasi ini tentunya dapat terwujud atas adanya rasa kebersamaan juga gotong royong dari seluruh stakeholder yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Diperlukan tanggung jawab serta kerja keras yang tinggi demi mencapai hasil saat ini. Dinas Kesehatan Kota Bandung sejak awal pandemi tentunya sigap dan memastikan situasi di masyarakat aman terkedali guna mencegah virus semakin menyebar. Perlahan pula timbul rasa empati serta inisiatif masyarakat yang ingin membantu pemerintah guna menyelesaikan permasalahan ini, hingga akhirnya pemerintah memilih strategi kolaborasi dengan membuka kesempatan bagi pihak-pihak lain juga masyarakat untuk bersama bahu-membahu berjuang menghadapi pandemi. Masyarakat dan YPM Salman ITB dengan segala kapasitas yang ada pun bersedia dan berkomitmen penuh dalam membantu. Hasil dari kolaborasi ini pun mulai bisa dirasakan, kasus perlahan melandai, aktifitas sehari-hari sudah dapat berjalan normal, dan masyarakat terhindar dari ancaman penyakit. Kedepannya, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu pemerintah di zaman ini sudah sepatutnya lebih fleksibel dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk melakukan kolaborasi maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain guna menyelesaikan permasalahan publik. Covid-19 yang awal mulanya sangat tidak terduga menjadi gelombang pandemi di seluruh dunia tentunya menjadi sebuah pembelajaran agar kedepannya sebuah pemerintahan mampu dan siap menghadapi ancaman serta permasalahan di berbagai sektor, dan strategi Collaborative Governance tentunya dapat menjadi pilihan yang patut diperhitungkan mengingat manfaat yang akan didapat akan lebih besar dibandingkan tanpa adanya kolaborasi.

Referensi

- Afriyani, A., Wahidah, I., Taufiq, M., & Wibowo, H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. In *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Vol. 3, Issue 2).
- Anang Sugeng Cahyono. (2021). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal Publiciana*, 13(1), 83–88. <https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Djaenuri, A., Supriyatna, T., & Hamdi, M. (2020). Model Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Listrik Negara Dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dalam Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan. *Jurnal Papatung*, 3(1).
- Ekha, R., Rika, T., Febri, P., & Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang Collaborative Governance In Handling The Spread Of Corona Virus Disease-19 Case In Padang City. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4.0, 133–137.
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (n.d.). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*.
- Sunu Astuti Hardi Warsono Abd Rachim, R. (n.d.). *Sampul Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Suparman, N., Tri Sakti, F., Saeful Anwar, H., & Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, J. (n.d.). *Sosial Ekonomi Di Indonesia*. <https://threechannel.co/category/aspirasi-warga/>,
- Susilo, A., Martin Rumende, C., Pitoyo, C. W., Djoko Santoso, W., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie Chen, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O., & Yuniastuti, E. (2020). Tinjauan Pustaka. In *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* | (Vol. 7, Issue 1). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucore/>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18.
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 119.
- Yahya, H. (n.d.). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. In *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* (Vol. 2, Issue 1).